

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Jl. Raya Telaga Bertong No. Taliwang

Telp. (0365) 41039 Kode Pos 84355

2023

## KATAPENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat Allah, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ini, dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, dan memberikan kontribusi baik berupa saran, masukan dan pemikiran-pemikiran kedepan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kualitas kegiatan serta program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 ini disampaikan semoga dapat memberikan kontribusi positif pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada umumnya.

Taliwang, Februari 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat,



**Ir.Irhas R.Raves, M.Si.**

NIP. 19651102 199003 1 011

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum .....	6
C. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	7
1. Struktur Organisasi .....	7
2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.....	8
3. Sumber Daya Aparatur.....	19
4. Sarana dan Prasarana.....	20
D. Isu-isu Startegis.....	24
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis (Renstra).....	26
1. Tujuan dan Sasaran .....	26
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	28
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
1. Pengungkapan Kinerja Tahun 2021 .....	30
2. Pengungkapan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021 .....	33
B. Realisasi Anggaran.....	37
1. Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	37
2. Pengungkapan Realisasi Anggaran antara Tahun 2020 dan 2021.....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran.....	40

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat lebih mengedepankan pola penerapan aspirasi masyarakat secara berjenjang dengan tetap merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, termasuk diantaranya RPJMD dan Renstra. Melalui berbagai mekanisme, maka tersusunlah dokumen perencanaan dan anggaran berupa Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan targetnya, sampai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen anggaran.

Untuk mewujudkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2021, maka telah tersusun **2 (dua) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) subkegiatan** melalui berbagai tahapan perencanaan dan anggaran. Dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut diperoleh capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar **96,54 %**.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang memuat pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD serta memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Tahun 2022.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dalam melaksanakan fungsi DPRD yaitu Pengawasan, Legislasi dan Penganggaran maka posisi Sekretariat sangat menentukan dalam memperlancar dan memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPRD. Namun demikian Sekretariat DPRD bukanlah bagian yang utuh dari badan legislatif, melainkan bagian integral dari eksekutif yang memiliki tupoksi melayani anggota DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pencapaian sasaran dalam LKjIP, menyajikan beberapa informasi, antara lain :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Smbawa Barat tahun 2022;
2. Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan.

## **B. DASAR HUKUM**

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat disusun dengan mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

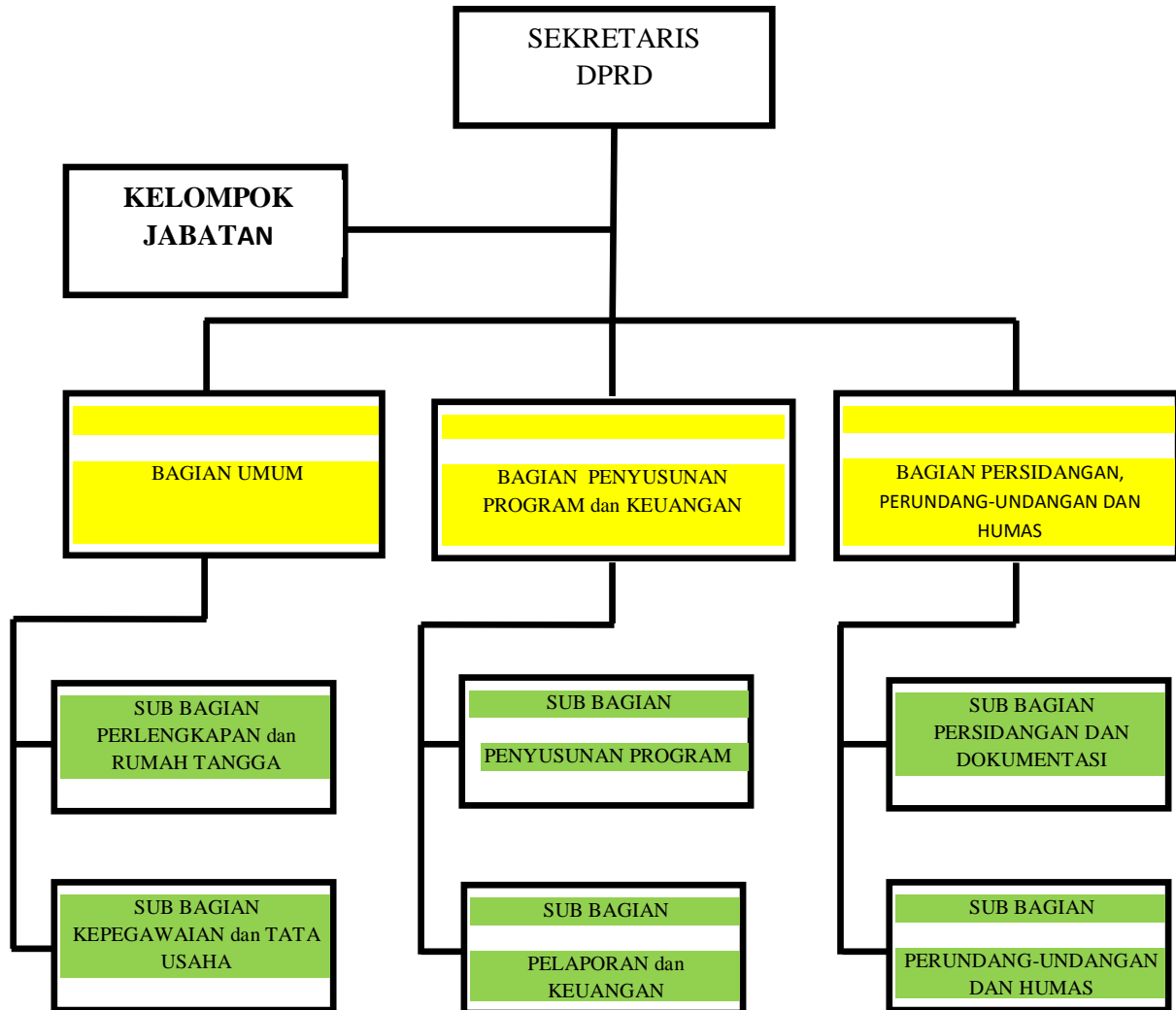
1. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 54 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

## C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

### 1. Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD  
Kabupaten Sumbawa Barat



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2016

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

#### 2.1. Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
  1. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
  2. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas mengatur dan membina urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, pengamanan, perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD

### 3. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 139 orang yaitu yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil dan 116 orang Non Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel.1.1. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretaris DPRD (Sekwan)	1	
2.	Kepala Bagian	3	
3	Kasubbag	6	
4	Staf Sekretariat	129	
<b>Jumlah</b>		<b>139</b>	

**Tabel. 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV/c	1	
2	Golongan IV/b	2	
3	Golongan IV/a	1	
4	Golongan III/d	3	
5	Golongan III/c	3	



6	Golongan III/b	1	
7	Golongan III/a	4	
8	Golongan II/d	1	
9	Golongan II/c	1	
10	Golongan II/b	5	
11	Golongan II/a	1	
12	Golongan I /a	-	
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	

**Tabel. 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Magister S-2	3	
2	Sarjana S-1	60	
3	Sarmud/ DIII	12	
4	SLTA	60	
5	SLTP	4	
<b>Jumlah</b>		<b>139</b>	

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut

**Tabel 4. Data Inventaris Barang Sekretariat DPRD**







#### **D. Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan ” Meningkatkan Kualias Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ”.

Adapun permasalahan dan Isu Strategis yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya peningkatan kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Perda dan Perda Inisiatif serta peningkatan fungsi kepastakaan dan kearsipan.
2. Diperlukannya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta tersusunnya dokumentasi kegiatan persidangan yang memadahi dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat kelengkapan dewan.
3. Diperlukannya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian.
4. Diperlukannya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitasi penyusunan program dan Keuangan DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Diperlukannya peningkatan kualitas fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.
6. Diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia pada Sekretariat DPRD belum memberikan pelayanan yang andal dan professional.

DPRD sebagai lembaga politik sekaligus lembaga perwakilan rakyat daerah selalu menjadi perhatian bagi publik. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan peran yang harus dilakoni oleh DPRD begitu tinggi, baik yang bersifat kelembagaan maupun yang bersifat orang per orang. Karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan ini, kinerja yang harus ditampilkan harus mampu menjawab ekspektasi dan tuntutan peran dari masyarakat, tidak saja oleh anggota DPRD namun juga oleh institusi pendukungnya yaitu Sekretariat DPRD. Dalam memenuhi ekspektasi dan tuntutan peran ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat harus mampu memperlihatkan kinerja yang optimal sebagai unsur pelayanan untuk kelancaran kegiatan DPRD, mempersiapkan Persidangan, menyiapkan Produk Perundang-Undangan, kegiatan Kehumasan, Pelayanan Umum untuk kelancaran DPRD dan melaksanakan kegiatan Administrasi dan Keuangan. Karena itu seluruh bagian dan sub-sub bagian dalam organisasi Sekretariat DPRD harus mampu berperan optimal dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya tersebut.

7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta pemanfaatan Teknologi Informasi yang cepat dan modern.

Dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD kabupaten Sumbawa Barat, saat ini Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah berupaya meningkatkan daya dukung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Sejumlah fasilitas pendukung harus disiapkan dan dikelola secara efisien untuk dapat memenuhi kebutuhan kerja dari para anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama sebagai wakil rakyat. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ini diharapkan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD dapat meningkat. Diharapkan dengan optimalisasi daya dukung ini ekspektasi masyarakat terhadap peran yang seharusnya diemban oleh setiap anggota DPRD sebagai para wakil rakyat dapat terpenuhi.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

##### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan berkaitan dengan pandangan ke depan, kemana instansi pemerintahan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara pasti dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, tidak terlepas dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KSB 2021-2026, yaitu

***“Terwujudnya KSB baik berlandaskan gotong-royong”.***

Mengacu pada visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yaitu ***KSB Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*** maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat adalah mengemban Tujuan :

***”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kepda Pimpinan dan Anggota DPRD ”***

Tujuan ini mengandung arti sebagai berikut :

***Aktualisasi Pelayanan Berkualitas***, menggambarkan bahwa dalam mendukung Tri Fungsi DPRD, institusi ini mampu memberikan pelayanan yang komprehensif dalam satu proses kegiatan yang paripurna, dari mulai perencanaan sampai ke hasil akhir laporan dan evaluasi. Hal ini sekaligus menghilangkan image bahwa selama ini Sekretariat DPRD hanya berkutat seputar pelayanan fisik saja. Misi adalah keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dari visi tersebut di atas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Sasaran sebagai berikut :

**1. MENINGKATNYA PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH.** Misi untuk meningkatnya pelayanan internal Perangkat Daerah merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal untuk pimpinan dan anggota DPRD dalam bidang adminitrasi dan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan kinerja DPRD.

**2. MENINGKATNYA PELAYANAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.** Misi untuk meningkatnya pelayanan Keuangan Perangkat Daerah merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal untuk pimpinan dan anggota DPRD dalam bidang adminitrasi keuangan, pembinaan dan pelayanan pengurusan serta pengelolaan keuangan DPRD, perencanaan anggaran dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan DPRD dalam mendukung peningkatan kinerja DPRD.

**3. MENINGKATNYA PELAYANAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUMAS.** Misi untuk meningkatnya pelayanan persidangan, perundang-undangan dan humas merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelayanan rapat untuk menunjang kinerja DPRD.

**Tabel 4.1. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	75	80	85	87	90	95
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100



	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A	A
	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	Persentase Perda yang disepakati	100	100	100	100	100	100

## 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Strategi dan kebijakan tersebut di atas akan dapat diukur melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya. Tabel berikut menggambarkan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	- Tingkat Pelayanan Internal Perangkat Daerah	- 100 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	- Realisasi Anggaran - Nilai SAKIP	- 100 % - BB
3.	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	- Persentase Perda yang disepakati	- 100 %

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat

yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Sumbawa Barat sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	- Tingkat Pelayanan Internal Perangkat Daerah	%	100	Triwulan I	40%
					Triwulan II	21%
					Triwulan III	35%
					Triwulan IV	4%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	- Realisasi Anggaran - Nilai SAKIP	- % - Skor	- 100 - BB	Triwulan I	34%
					Triwulan II	30%
					Triwulan III	34%
					Triwulan IV	2%
3.	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	- Persentase Perda yang disepakati	- %	- 100	Triwulan I	35%
					Triwulan II	23%
					Triwulan III	40%
					Triwulan IV	2%

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANINASI

#### 1. Pengungkapan Kinerja Tahun 2022

Pengungkapan Kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2022 sesuai yang telah di sepakati bersama dalam hal ini antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Bupati Sumbawa Barat. Pengukuran tersebut menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja seperti pada tabel 2. dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	- Tingkat Pelayanan Internal Perangkat Daerah	- 100 %	- 100 %	100
2.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	- Realisasi Anggaran - Nilai SAKIP	- 100 % - BB	- 96,54% - BB	96,54 -BB
3.	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-Undangan dan Humas	- Persentase Perda yang disepakati	- 100 %	- 100 %	100

1. Kinerja sasaran Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah item Pelayanan Internal yang disediakan pada tahun 2022 untuk memenuhi semua kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terpenuhi 100 % sesuai dengan yang ditargetkan yakni 100%, sehingga jika dikalikan dengan 100% akan menghasilkan 100% sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran terpenuhinya pelayanan internal perangkat daerah terhadap DPRD.

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Jumlah Item Pelayanan Internal yang disediakan dibagi dengan Jumlah Item Pelayanan yang dibutuhkan dikali seratus.

Kinerja sasaran Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah dengan indikator Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100% (100/100*100%)	100%	100%

2. Sasaran Meningkatkan pelayanan keuangan Perangkat Daerah dimana ditentukan oleh Nilai Realisasi Anggaran dan nilai SAKIP dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Realisasi Anggaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 96,54% dari target 100%. Realisasi Anggaran dari Sekretariat DPRD tidak mencapai 100% dikarenakan ada sisa anggaran dari berapa kegiatan yang menjadi sisa atau tidak habis terpakai sehingga dikembalikan ke kas daerah. Sedangkan untuk Nilai SAKIP Sekretariat DPRD adalah BB dari target BB.

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	- Realisasi Anggaran - Nilai SAKIP	- Besaran Realisasi Keuangan dibagi Besaran Anggaran dikali seratus - Katagori Nilai SAKIP

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayan Keuangan Perangkat Daerah indikator Realisasi Anggaran dan Nilai SAKIP pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	- Realisasi Anggaran - Nilai SAKIP	- 100 % - B	- 100% - BB	- 96.54 % - BB	- 96.54% - BB	- 100 % - A	- 98.76 % - BB

3. Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas ditentukan oleh Persentase Perda yang disepakati dan mencapai nilai 100 % sesuai dengan target di Renja dan Renstra. Hal ini tercapai karena sekretariat DPRD berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk kelancaran pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	- Persentase Perda yang disepakati	- Jumlah Perda yang disetujui dibagi dengan jumlah perda yang diajukan dikali seratus

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas dengan indikator Persentase Perda yang disepakati pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Perda yang disepakati	100%	100%	100%	100% (100/100*100%)	100%	100%

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022 mencapai 96,54 % dikarenakan oleh perencanaan target yang ingin dicapai ditahun berjalan ada yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kegiatan sehingga hasil yang didapatkan tidak seimbang. Hal ini juga didasari oleh ada beberapa subkegiatan yang realisasinya tidak maksimal sehingga anggarannya kembali ke kas daerah.

## 2. Pengungkapan Capaian Kinerja

Pengungkapan Perbandingan Kinerja Tahun 2019-2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan penetapan kinerja tahunan yang telah di sepakati bersama dalam hal ini antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Bupati Sumbawa Barat. Pengukuran tersebut menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja seperti pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	- Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	- Realisasi Anggaran - Nilai SAKIP	91,51 % B	97,26 % B	98,76 % B	96,54 % B	99 % BB	98.21 % BB
3.	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	- Persentase Perda yang disepakati	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Perbandingan Sasaran Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan Tahun 2022 Capaian Kinerja dan rasionya sama yakni 100 %. Hal ini karena memang diharapkan untuk indikator tersebut realisasi dari tahun ke tahun tetap selaras yakni 100 %. Indikator pada sasaran ini memang diharapkan tetap

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 5 tahun Renstra dan diharapkan pada tahun terakhir Renstra semua sasaran akan mencapai hasil 100 %.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah :

- Selalu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai kecukupan pembagian Subsubbagian agar mampu melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang dibebankan pada setiap bagian.
- Selalu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai ruang lingkup dan rentang kendali tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan Sub-subbagian.
- Selalu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai sistem pengorganisasian yang lebih jelas mengenai penanggung jawab setiap kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pelayanan internal Perangkat Daerah adalah :

- Kerja sama semua bagian/pihak
- Memperbaiki sistem kerja untuk mencapai target kerja yang sudah ditetapkan
- Optimalisasi kerja terus ditingkatkan

Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sasaran adalah :

- Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan.
- Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat.

2. Perbandingan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah capaian kinerjanya mencapai 98.76 % pada tahun 2021 dan 96.54 % di tahun 2022. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah :

- Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan tidak berjalan maksimal sehingga serapan anggaran tidak optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- Kerja sama semua bagian/pihak

- Memperbaiki sistem kerja untuk mencapai target kerja yang sudah ditetapkan
- Optimalisasi kerja terus ditingkatkan

Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sasaran adalah :

- Ketidaktersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kinerja.
- Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat.

3. Pada Sasaran Meningkatkan Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas baik di tahun 2019 sampai tahun 2022 telah mencapai 100 %. Hal ini karena berkaitan dengan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD sehingga hasil yang diharapkan pun harus memberikan pelayanan dan hasil yang maksimal yaitu 100 %.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah :

- Selalu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai kecukupan pembagian Subsubbagian agar mampu melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang dibebankan pada setiap bagian.
- Kerjasama yang baik di setiap masing-masing bagian dan Sub-subbagian.
- Pelayanan Maksimal
- Perencanaan yang maksimal

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatnya Ketertiban Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas adalah :

- Kerja sama semua bagian/pihak
- Memperbaiki sistem kerja untuk mencapai target kerja yang sudah ditetapkan
- Optimalisasi kerja terus ditingkatkan

Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sasaran adalah :

- Ketidaktersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kinerja.
- SDM berkualitas masih kurang.



## 1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Alam

### Sasaran I

Jumlah Subkegiatan			Anggaran 2021		Anggaran 2022	
2021	2022	Efisiensi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
21	19	-2	4.517.995.940	4.395.469.491	7.976.164.500	7.477.823.641

Pada sasaran I terjadi efisiensi subkegiatan sebanyak 2 subkegiatan tetapi terjadi tambahan anggaran sebesar Rp. 3.458.168.560 dikarenakan pada sasaran I di Tahun 2022 di subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas sebesar 1.950.000.000 sehingga dengan otomatis ada penyesuaian pagu anggaran.

### Sasaran II

Jumlah Subkegiatan			Anggaran 2021		Anggaran 2022	
2021	2022	Efisiensi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
15	15	0	6.603.470.530	6.512.938.384	21.144.090.990	20.951.428.467

Di Sasaran II, tidak terjadi efisiensi subkegiatan akan tetapi ada peningkatan pagu anggaran dikarenakan pagu untuk gaji dan tunjangan ASN maupun DPRD untuk tahun 2022 dibebankan kepada SKPD. Pada tahun 2021 penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD masih dibebanlan di BPKD Kabupaten Sumbawa Barat.

### Sasaran III

Jumlah Subkegiatan			Anggaran 2021		Anggaran 2022	
2021	2022	Efisiensi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
15	16	+1	7.633.926.850	7.470.934.246	14.445.336.430	13.843.360.216

Sasaran III antara 2021 dengan 2022 terjadi penambahan subkegiatan yakni yang semula berjumlah 15 subkegiatan di 2021 menjadi 16 subkegiatan di 2022. Terjadi penambahan pagu anggaran yang cukup signifikan di Sasaran III yakni di subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang berisikan perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pengungkapan realisasi keuangan merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan realisasi terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2022. Anggaran tersebut digunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, yaitu melalui pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).Tabel berikut berisi pengukuran pencapaian (realisasi) keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022.

Tabel 4. Pengukuran Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	<b>BELANJA</b>	<b>43.810.343.816</b>	<b>42.296.378.237</b>	<b>96,54</b>
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.055.980.346	14.665.246.348	98,78
	Belanja Pegawai	15.055.980.346	14.665.246.348	97,40
II	BELANJA LANGSUNG	28.754.363.470	27.631.131.889	95,20
	Belanja Barang dan Jasa	25.791.363.470	24.953.168.266	96,75
	Belanja Modal	2.963.000.000	2.677.963.623	89,94

No.	Sasaran Strategis	Target Dana (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	7.976.164.500	7.477.823.641	93,75
2.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	21.144.090.990	20.951.428.467	99,09

3.	Meningkatkan Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	14.445.336.430	13.843.360.216	95,83
----	--	----------------	----------------	-------

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pencapaian keuangan untuk mendukung ketiga sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022 cukup tinggi rata-rata 96,54%, hal ini membuktikan pencapaian keuangan mampu dicapai seiring dengan pencapaian kinerja. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 termasuk kategori **BAIK**.

Total belanja Sekretariat DPRD Tahun 2022 sebesar Rp. **43.810.343.816** terealisasi sebesar Rp. **42.296.378.237** atau **96,54%**. Sisa anggaran sebesar Rp.**1.513.965.579** atau **3,46%** antara lain bersumber dari :

Sisa Belanja Gaji dan Tunjangan, Sisa pengadaan Barang dan Jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas kantor dan Perjalanan Dinas DPRD, Makan Minum serta Jasa Transportasi Peserta Paripurna, Efisiensi Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas, efisiensi belanja Pajak kendaraan Bermotor Kantor, dan Efisiensi Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor.

Meskipun belanja tidak terserap 100%, namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 96,54%, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021 **TINGGI**.

## 2. Pengungkapan Realisasi Anggaran antara Tahun 2022 dan 2023

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 dan 2022

No.	Sasaran Strategis	2020			2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	4.517.995.940	4.395.469.491	97,29	7.976.164.500	7.477.823.641	93,75
2.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	21.144.090.990	20.951.428.467	99,09	21.144.090.990	20.951.428.467	99,09
3.	Meningkatkan Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	9.818.663.980	9.684.056.863	98,63	14.445.336.430	13.843.360.216	95,83

Jika dilakukan perbandingan pencapaian (realisasi) keuangan antara tahun 2021 dan 2022, maka terlihat pada tabel di atas bahwa realisasi dana pada tahun 2021 (98,76%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 (96,54%) dan sebagai gambaran, pagu anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021 (36.413.748.660) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (43.810.343.816), Perbedaan Pagu Anggaran tersebut dikarenakan adanya peningkatan pagu anggaran di subkegiatan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Tugas DPRD dan distribusi anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke Sekretariat DPRD yang cukup besar serta adanya pengadaan belanja kendaraan Dinas Pimpinan DPRD sebanyak 3 Unit sehingga pagu anggaran tahun 2022 cukup tinggi.

Di tahun 2021 Sekretariat DPRD mempunyai program kegiatan 2 Program dengan 17 kegiatan dengan 51 subkegiatan. Sedangkan di tahun 2022 mempunyai 2 Program dengan 17 kegiatan dengan 52 subkegiatan.

Sebagai Catatan bahwa tahun 2021 adalah Tahun dimana mulai diberlakukan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Pemutakhiran terkait perubahan Struktur dan Nomenklatur.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022 menunjukkan pelaksanaan yang baik yakni realisasi sebesar 96.54 %. Dilihat dari sisi pencapaian akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022 untuk semua sasaran (tiga sasaran strategis) berikut indikator kerjanya secara umum cukup baik. Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu diambil langkah-langkah strategis untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur;
2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur dalam menyusun sasaran, capaian dan indikator kinerja masing-masing;
3. Konsistensi terhadap format LKjIP;
4. Singkronisasi dan penyelarasan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dengan dokumen lain yang menjadi rujukan, yaitu antara RPJMD, Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan harus terus dilakukangn dengan dukungan instansi terkait Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Instansi terkait lainnya.

